

ANALISIS COMPARATIVE KINERJA KEUANGAN PADA KPPN SURAKARTA TAHUN 2022-2023

Aulia Mayang Sriprasetyo, Suhesti Ningsih

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

E-mail: auliamayang5466@gmail.com

E-mail: hesti.hegi@gmail.com

Abstract

Financial performance indicates how successfully a firm has implemented sound financial management practices. In order to gather sufficient information about financial performance and set future planning goals, financial statement can be analyzed in order to evaluate financial performance. Through comparative research, the financial performance of KPPN Surakarta in 2022 and 2023 is to be ascertained in this study. Comparative analysis is the method of analysis that is employed. Secondary data is used in research, and a sort of descriptive research methodology is employed. The researcher obtained data in the form of cash flow statements and balance sheet reports at the KPPN Surakarta level for two periods from 2022 to 2023. According to the analysis, there has been a notable growth in KPPN Surakarta's overall financial performance between 2022 and 2023, particularly in grant income. This indicates that flow of money within KPPN Surakarta's purview is growing.

Keywords : comparative analysis, financial Analysis, financial performance

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau disebut KPPN adalah organisasi sektor publik yang menjalankan tanggung jawabnya sebagai Bendahara Umum Negara (BUN), berperan dalam mengelola keuangan negara. Kinerja instansi pemerintah dapat tergambar dari tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi sehingga menunjukkan keberhasilan atau tidaknya pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam mewujudkan akuntabilitas organisasi, perlu dilakukan pengukuran kinerja keuangan untuk evaluasi kinerja keuangan pada periode tertentu yang menunjukkan peningkatan atau penurunan, serta pengambilan keputusan untuk tujuan kedepan. Kinerja keuangan dapat dinilai melalui tinjauan laporan keuangan yang dikelola.

KPPN Surakarta selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa BUN (UAKBUN) Daerah melaksanakan penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kuasa BUN atas transaksi keuangan yang diproses melalui UAKBUN-Daerah. Laporan keuangan yang disusun hanya memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang tercermin dalam Laporan Arus Kas (LAK) serta pengaruh terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas yang menjadi tanggung jawab BUN yang tercermin dalam Neraca Tingkat KPPN Surakarta.

Dalam menjaga kualitas dan keakuratan laporan keuangan yang disusun oleh KPPN, dilakukan penilaian atas laporan keuangan berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Selanjutnya, hasil penilaian tersebut digunakan sebagai dasar pencapaian Indikator Kinerja kualitas laporan keuangan Kuasa BUN-D KPPN.

Tinjauan Pustaka

- a. Menurut Fahmi (2012: 2), kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana organisasi telah berhasil dan tepat menerapkan pedoman implementasi keuangan dengan baik dan benar.
- b. Laporan Keuangan yang disusun sesuai PMK 173 Tahun 2023 berfungsi sebagai sarana pemantauan bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dirumuskan oleh pemerintah dan didasarkan pada standar akuntansi pemerintah diimplementasikan.
- c. Analisis perbandingan, menurut Harahap (1997), adalah Teknik untuk mengevaluasi laporan keuangan yang memerlukan kontras antara laporan keuangan yang disajikan secara horizontal dengan data lain, seperti informasi keuangan yang ditampilkan dalam satuan dan rupiah. Teknik membandingkan data laporan keuangan selama dua periode atau lebih disebut *analysis comparative*.

Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-Daerah terdiri dari :

- 1) Neraca adalah laporan yang mencantumkan semua aset, utang, dan ekuitas pemerintah pada tanggal tertentu;
- 2) Laporan Arus Kas (LAK) merupakan laporan yang memecah arus kas masuk dan keluar selama periode waktu tertentu, yang dibagi menjadi empat kategori: aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris;
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah laporan yang merinci bagaimana ekuitas meningkat atau menurun pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya; dan
- 4) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah laporan yang memberikan daftar terperinci atau analisis nilai pos yang tercantum dalam laporan operasional, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih dalam konteks pengungkapan yang tepat.

KPPN Surakarta sebagai salah satu unit vertikal di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, yang bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. KPPN bertanggung jawab untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara, mengalokasikan uang untuk belanja anggaran, serta melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara. KPPN berkewajiban untuk menjunjung tinggi kaliber transaksi transaksi keuangan yang berada di bawah pengawasannya. Menjaga kualitas data ini dilakukan dengan analisis internal terhadap data yang dikelola dan dengan pelaksanaan rekonsiliasi dengan pengguna anggaran.

Penelitian terdahulu tentang kinerja keuangan menggunakan analisis perbandingan telah dilakukan oleh Nurrahmania (2021) dengan menggunakan data laporan keuangan berupa neraca dari dua Bank yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesamaan dan perbedaan. Mengingat uraian sebelumnya, permasalahan penelitian dinyatakan sebagai:

- 1) Bagaimana kinerja keuangan pada laporan arus kas di KPPN Surakarta pada tahun 2022 dan 2023.
- 2) Bagaimana kinerja keuangan pada neraca di KPPN Surakarta pada tahun 2022 dan 2023.

Analisis *comparative* ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan KPPN Surakarta pada tahun 2022 dan 2023, dengan fokus pada setiap variasi jumlah pos laporan keuangan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian penulis termasuk dalam kategori penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif, menurut Narbuko & Ahmadi (2015), adalah investigasi yang mencari solusi berbasis data untuk

masalah yang sudah ada. Dalam penelitian deskriptif, prosedur analisis terdiri dari penyajian, analisis, dan interpretasi.

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Sugiyono (2018; 13) mendefinisikan data kuantitatif sebagai pendekatan penelitian positivis (data konkret) yang menggunakan pengukuran numerik yang dilakukan melalui analisis statistik sebagai instrument perhitungan untuk mendapatkan kesimpulan tentang topik yang sedang diselidiki.

Sumber data sekunder menyediakan data penelitian. Peneliti memperoleh data berupa Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah KPPN Surakarta pada tahun 2022-2023.

Analisis perbandingan (*analysis comparative*) adalah metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Laporan keuangan tahun 2022 dan 2023, khususnya laporan arus kas dan neraca akan dibandingkan sebagai bagian dari analisis penelitian ini. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui perubahan yang terjadi terkait dengan kondisi keuangan apakah itu menunjukkan peningkatan atau penurunan.

Rumus *analysis comparative* menurut Harahap (2017) adalah:

$$\text{Indeks} = (\text{Tahun Comparative} : \text{Tahun Dasar}) \times 100\%$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1) Laporan Arus Kas

Arus kas masuk dan keluar berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas, investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris melalui atau dari rekening BUN, pemotongan SPM, dan kegiatan yang tidak melalui rekening BUN tetapi memerlukan persetujuan Kuasa BUN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan semuanya tercantum dalam Laporan Arus Kas (LAK). Laporan Arus Kas KPPN Surakarta bulan Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 1
LAK TINGKAT KPPN
PER 31 DESEMBER 2022 & 2023
(Dalam Rupiah)

PENJELASAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Negara dan Hibah	532.806.564.547	329.663.003.163
Penerimaan Negara Bukan Pajak	493.684.896.547	328.151.384.163
424 Pendapatan Badan Layanan Umum	493.684.896.547	328.151.384.163
Penerimaan Hibah	39.121.668.000	1.511.619.000
431 Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri	39.121.668.000	1.511.619.000
Jumlah Arus Kas Masuk	532.806.564.547	329.663.003.163
Arus Kas Keluar		
Belanja Negara	625.444.338.662	445.538.166.112
Belanja Pegawai	3.694.074.600	4.144.344.195
Belanja Barang	621.750.264.062	441.393.821.917
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	420.588.291.000	361.908.462.400
Dana Desa	420.588.291.000	361.908.462.400
Jumlah Arus Kas Keluar	1.046.032.629.662	807.446.628.512
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(513.226.065.115)	(477.783.625.349)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas Masuk		
Arus Kas Keluar		
Belanja Negara	113.166.937.711	54.186.593.189
Belanja Modal	113.166.937.711	54.186.593.189
531 Belanja Modal Tanah	0	58.228.400

532 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.332.949.858	1.838.333.927
533 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.558.745.833	1.118.734.318
534 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	27.138.885.724	0
536 Belanja Modal Lainnya	451.139.802	1.097.187.100
537 Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)	42.685.216.494	50.074.109.444
Jumlah Arus Kas Keluar	113.166.937.711	54.186.593.189
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(113.166.937.711)	(54.186.593.189)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Kas Masuk		
Arus Kas Keluar		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0	0
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Non Anggaran	794.362.095.386	562.474.500.422
811 Penerimaan Non Anggaran PFK	420.588.291.000	361.908.462.400
815 Penerimaan Transito	373.773.804.386	200.566.038.022
Jumlah Arus Kas Masuk	794.362.095.386	562.474.500.422
Arus Kas Keluar		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	794.362.095.386	562.474.500.422
Kenaikan (Penurunan) Kas Sebelum Koreksi Pembukuan	167.969.092.560	30.504.281.884
Kenaikan (Penurunan) Kas Setelah Koreksi Pembukuan	167.969.092.560	30.504.281.884
Saldo Awal Kas	387.851.933.224	357.347.651.340
Saldo Akhir Kas	555.821.025.784	387.851.933.224
Saldo Akhir Kas BLU	518.437.357.784	387.851.933.224
Saldo Akhir Kas Lainnya di KL	37.383.668.000	0
Saldo Akhir Setara Kas	0	0
Saldo Akhir Kas KPPN	0	0
Saldo Akhir Kas BUN	0	0
Saldo Akhir Kas Rekening Pemerintah Lainnya	0	0
Saldo Akhir Aset Lainnya (Kas Rekening Escrow)	0	0

2) Neraca

Status keuangan entitas sehubungan dengan aset, kewajiban, dan ekuitasnya ditampilkan pada neraca pada tanggal tertentu. Berikut adalah neraca 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023:

Tabel 2
NERACA TINGKAT KPPN
PER 31 DESEMBER 2022 & 2023
(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	2023	2022	KENAIKAN (PENURUNAN)	
			JUMLAH	%
ASET				
Aset Lancar				
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	15.822.500	(15.822.500)	-100,00
Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga	37.383.668.000	0	37.383.668.000	100,00
Kas pada Badan Layanan Umum	518.437.357.784	387.851.933.224	130.585.424.560	33,67
Jumlah Aset Lancar	555.821.025.784	387.867.755.724	167.953.270.060	43,30
Investasi Jangka Panjang				
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0	0	0	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	0	0	0	0,00
Jumlah Dana Bergulir Diragukan Tertagih	0	0	0	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Aset Tetap				
Jumlah Aset tetap	0	0	0	0,00
Jumlah Dana Cadangan	0	0	0	0,00
Aset Lainnya				
Jumlah Aset Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah Aset	555.821.025.784	387.867.755.724	167.953.270.060	43,30
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek				
Utang kepada Pihak Ketiga	106.380.000	0	106.380.000	100,00

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	106.380.000	0	106.380.000	100,00
Kewajiban Jangka Panjang				
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang				
Jumlah Dicadangkan untuk Komitmen Belanja				
Jumlah Kewajiban	106.380.000	0	106.380.000	100,00
EKUITAS				
Ekuitas	555.714.645.784	387.867.755.724	167.846.890.060	43,27
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	555.821.025.784	387.867.755.72	167.953.270.060	43,30

B. Pembahasan

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas untuk KPPN Surakarta dibuat dengan membandingkan data tahun 2022 dengan informasi dari aplikasi SPAN. Laporan Arus Kas tersebut menampilkan jumlah kas yang masuk dan keluar dari rekening yang dikelola oleh KPPN Surakarta, yang bertindak sebagai Kuasa BUN.

Pada 1 Januari 2023, saldo awal kas pemerintah di KPPN Surakarta sebesar Rp387.851.933.224,00. Jumlah ini setara dengan total saldo kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp387.851.933.224,00. Hingga 31 Desember 2023, perubahan kas di KPPN Surakarta sebesar Rp167.969.092.560,0. Pembaruan ini memberikan informasi tentang modifikasi nilai kas dari berbagai aktivitas pemerintah. Total saldo akhir kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp555.821.025.784,00. Jumlah ini adalah saldo kas pemerintah pusat yang langsung dapat diakses untuk digunakan.

1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi mengacu pada pendapatan dan pengeluaran kas untuk operasi pemerintah selama periode akuntansi tertentu. Sisa arus kas bersih dari aktivitas operasi pada tahun 2023 adalah Rp(513.226.065.115,00). Arus kas operasi turun sebesar Rp35.442.439.766,00 atau 7,42% dari Rp(477.783.625.349,00) pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan kenaikan arus kas masuk yang seluruhnya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan Hibah, lebih sedikit dibandingkan dengan pertumbuhan arus kas operasi hasil realisasi Belanja Barang Penyaluran Dana Desa.

a) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi menghasilkan arus kas masuk seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan hibah. PNBP mengacu pada penerimaan pemerintah yang tidak berasal dari pajak atau hibah. Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) yang telah disetujui oleh Kuasa BUN merupakan sumber PNBP pada LAK KPPN. PNBP tahun 2023 yang berasal dari penerimaan BLU mengalami peningkatan sebesar Rp165.533.512.384,00 atau 50,44% dari tahun 2022. Kenaikan yang signifikan ini dikarenakan pada tahun 2023 satker Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (547601) ditetapkan sebagai BLU sehingga wajib menyampaikan pengesahan pendapatan dan belanjanya kepada KPPN sehingga mengajukan pendapatan dan belanjanya tercatat dalam Laporan Keuangan KPPN Surakarta. Penerimaan Jasa Layanan tahun 2023 berasal dari Penerimaan Layanan Rumah Sakit dan Jasa Pendidikan meningkat sebesar Rp171.304.545.487,00 atau 58,63% dari tahun 2022 sebesar Rp292.164.609.733,00,. Penerimaan Hasil Kerjasama BLU tahun 2023 meningkat sebesar Rp181.095.592,00 atau 22,54% dari tahun 2022. Kenaikan ini berasal dari hasil kerjasama dengan lembaga/badan usaha dan Pemerintah Daerah. Pendapatan BLU Lainnya juga meningkat sebesar Rp10.789.975.105,00 atau 93,49% dari tahun 2022. Peningkatan signifikan ini berasal dari peningkatan Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU. Namun demikian, dibandingkan tahun 2022,

penerimaan dari alokasi APBN tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp16.742.103.800,00 atau 70,81%. Sementara itu, Penerimaan Hibah BLU masih sama dengan tahun 2022 sebesar Rp0,00.

Pendapatan negara dari hibah luar negeri dan domestik dikenal sebagai penerimaan hibah. Jumlah hibah yang diterima pada tahun 2023 sebesar Rp37.610.049.000,00 atau 2488,06% lebih banyak dari tahun 2022. Peningkatan signifikan ini berasal dari hibah uang yang diterima satker KPU untuk keperluan Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024. Selain itu, ada juga penerimaan hibah uang pada satker Korem-074/WRT DAM IV/DIP, Polres Sukoharjo dan Lanud Adi Soemarmo.

b) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Penggunaan arus kas dari aktivitas operasi berikut digunakan untuk mendanai Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Lainnya. Pembayaran pegawai adalah biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam membayar upah dan tunjangan bagi Pejabat Negara, TNI/Polri, Dokter PTT, Pegawai Negeri Sipil, dan Non PNS. Pembayaran pegawai bersih pada tahun 2023 berjumlah Rp3.694.074.600,00, dimana komponen terbesar adalah untuk biaya makan yang mengalami penurunan sebesar Rp450.269.595,00 atau 10,86% dari tahun 2022 sebesar Rp4.144.344.195,00.

Pembayaran Barang bersih meningkat sebesar Rp180.356.442.145,00 atau 40,86% dari Rp441.393.821.917,00 pada tahun 2022 menjadi Rp621.750.264.062,00 pada tahun 2023. Kenaikan ini berasal dari peningkatan signifikan hampir setiap komponen Belanja Barang dari tahun 2022, termasuk Belanja Persediaan, Belanja Barang Operasional, dan Belanja Barang Non Operasional.

Belanja Jasa Profesi pada satker BBGP Provinsi Jawa Tengah berkontribusi terhadap peningkatan belanja jasa tahun 2023 yaitu sebesar Rp33.361.385.113,00 atau 103,15% lebih banyak dari tahun 2022.

Belanja Perjalanan Dinas naik Rp37.405.454.769,00 atau 75,34% pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Pengeluaran Perjalanan Biasa dan Pengeluaran Perjalanan Dinas untuk Paket Pertemuan Luar Kota adalah sumber pertumbuhan ini.

Belanja Barang BLU pada tahun 2023 meningkat sebesar Rp72.841.262.658,00 atau 29,42% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut salah satunya disebabkan oleh penetapan UIN Raden Mas Said Surakarta sebagai BLU pada tahun 2023 sehingga menambah jumlah Belanja Barang BLU pada LAK KPPN Surakarta.

Jumlah Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah pada tahun 2023 tumbuh sebesar Rp3.756.127.300,00 atau 25040,85% dibandingkan tahun 2022. Belanja Peralatan dan Mesin dan Bangunan Tugas Bantuan dan Pengeluaran Bangunan adalah pendorong utama peningkatan yang signifikan ini.

Namun demikian, Belanja Pemeliharaan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp5.542.535.183,00 atau 55,43% dari tahun 2022.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) adalah Belanja Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dan Desa untuk membiayai pelaksanaan semua urusan yang diserahkan kepada mereka. Dana Desa yang direalisasikan hingga Desember 2023 sebesar Rp420.588.291.000,00, naik Rp58.679.828.600,00 atau 16,21% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp361.908.462.400,00. Alasan kenaikan tersebut adalah bertambahnya jumlah

pagu alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Non Bantuan Langsung Tunai (Non-BLT) untuk sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi penyebab kenaikan tersebut.

2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas untuk perolehan dan pelepasan aset tetap, serta investasi lain yang tidak termasuk dalam kas dan setara kas. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non finansial pada tahun 2023 sebesar Rp(112.166.937.711,00). Terjadi penurunan arus kas investasi sebesar Rp58.980.344.522,00 atau 108,85% dari tahun 2022 sebesar Rp54.186.593.189,00. Hal ini karena tidak ada kas masuk dalam aktivitas investasi, namun terjadi peningkatan arus kas keluar yang signifikan dari investasi sebagai akibat dari realisasi Belanja Modal untuk Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal-BLU.

a) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Karena seluruh unit KPPN selaku Kuasa BUN tidak memiliki fungsi untuk melakukan utang atau investasi, maka tidak ada arus kas masuk dalam aktivitas operasi. Seluruh pembiayaan dan investasi nantinya akan disajikan dalam Laporan Arus Kas pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

b) Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi

Perolehan aset tetap, aset lainnya, penyertaan modal pemerintah, dan pembelian investasi dalam bentuk surat berharga adalah contoh arus kas dari aktivitas investasi.

Belanja Modal atas perolehan tanah tahun 2023 sebesar Rp0,00, turun Rp58.228.400,00 dari tahun 2022, karena pada tahun 2023 tidak ada realisasi Belanja Modal Tanah melalui mekanisme UP/TUP, sedangkan pada tahun 2022 terdapat Belanja Modal penyusunan sertifikat tanah.

Belanja Modal untuk perolehan peralatan dan mesin pada tahun 2023 meningkat sebesar Rp14.494.615.931,00 atau 788,46% dibanding tahun 2022. Kenaikan ini terjadi karena adanya aktivitas pembayaran Belanja Peralatan dan Mesin pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Surakarta melalui mekanisme UP/TUP pada tahun 2023.

Belanja Modal untuk pembelian gedung dan bangunan pada tahun 2023 meningkat sebesar Rp25.440.011.515,00 atau 2274,00% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan yang signifikan ini disebabkan oleh peningkatan aktivitas pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan di unit kerja dalam lingkup pembayaran KPPN Surakarta melalui mekanisme UP/TUP pada tahun 2023.

Berkat realisasi pembayaran Belanja Modal Jaringan SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Bengawan Solo, SNVT untuk Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Bengawan Solo, dan SNVT Air Tanah dan Air Baku BBWS Bengawan Solo pada tahun 2023, maka Belanja Modal yang dialokasikan untuk perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada tahun 2023 mengalami peningkatan 100% dibandingkan tahun 2022.

Melalui mekanisme UP/TUP, perolehan aset tetap lainnya/aset lainnya pada tahun 2023 mengakibatkan penurunan Belanja Modal sebesar Rp646.047.298,00 atau 58,88% dari tahun 2022.

Pada tahun 2023, terjadi penurunan belanja modal sebesar Rp7.388.892.950,00 atau 14,76% penurunan Penurunan aktivitas pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU dan Belanja Modal jalan, irigasi, dan jaringan dalam lingkup pembayaran KPPN Surakarta tahun 2023 mengakibatkan penurunan belanja

modal sebesar Rp7.388.892.950,00 atau 14,76% dibandingkan tahun 2022 atas perolehan aset tetap/aset lainnya.

3) Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Penerimaan dan pengeluaran kas aktivitas transitoris tidak berpengaruh pada pendapatan, pengeluaran, atau pendanaan pemerintah dan tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi APBN dan. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris meningkat menjadi Rp794.362.095.386,00 pada tahun 2023 dari Rp562.474.500.422,00 pada tahun 2022. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan (DHP) Dana Desa dan Penerimaan Transito yang berasal dari Pengembalian Persediaan Tambahan (TUP) Dana Rupiah dan Penerimaan *Escrow*. Kenaikan tersebut sebesar Rp231.887.594.964,00 atau 41,23%.

a) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Penerimaan Non Anggaran Perhitungan Pihak Ketiga pada tahun 2023 naik Rp58.679.828.600,00 atau 16,21% dari Rp361.908.462.400,00 pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan pagu alokasi Dana Desa untuk Non Bantuan Langsung Tunai (Non-BLT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah meningkat.

Penerimaan Transito tahun 2023 secara keseluruhan, terdapat kenaikan sebesar Rp173.207.766.364,00 atau 86,36% dari tahun 2022. Kenaikan ini berkaitan dengan peningkatan aktivitas transaksi melalui UP/TUP oleh satuan kerja lingkup KPPN Surakarta.

Selain itu, terdapat Penerimaan Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga pada tahun 2023 sebesar Rp73.883.649.909. Jumlah tersebut merupakan total nilai SP2D Pengisian RPATA pada 16 satker di wilayah kerja KPPN Surakarta.

b) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Karena tidak terdapat pengeluaran Potongan Pihak Ketiga (PFK), pengeluaran non-anggaran pihak ketiga, dan pemberian UP/TUP kepada Bendahara Pengeluaran, maka tidak ada arus kas dari aktivitas transitoris. Setiap UP/TUP di Bendahara Pengeluaran telah sepenuhnya dipertanggung jawabkan.

Hasil dari analisis *comparative* membuktikan bahwa laporan arus kas tahun 2023 mengalami peningkatan paling signifikan sebesar 2488,06% dari tahun 2022 terjadi pada penerimaan hibah uang, salah satunya adalah hibah uang yang diterima oleh satker KPU karena adanya Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024. Selain itu, terjadi penurunan 7,42% dalam arus kas operasi yang lebih tinggi daripada arus kas masuk. Karena peningkatan arus kas keluar investasi, arus kas investasi menurun sebesar 108,85% pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022.

Neraca

Dari sisi aset, kewajiban, dan ekuitas, posisi keuangan KPPN Surakarta sebagai Kuasa BUN daerah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut: aset sebesar Rp555.821.025.784,00 dan Rp387.867.755.724,00; kewajiban sebesar Rp106.380.000,00 dan Rp0,00; serta ekuitas sebesar Rp555.714.645.784,00 dan Rp387.867.755.724,00.

1) Aset Lancar

Aset lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp387.867.755.724,00 dan 555.821.025.784,00. Karena kenaikan Kas di Badan Layanan Umum dan Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga, aset lancar meningkat sebesar 43,30% pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022.

a) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas yang dimiliki Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp 15.822.500,00. Kas ini berasal dari Uang Persediaan (UP) yang belum disetorkan atau dicatat ke kas negara per 31 Desember 2023. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab untuk mengendalikan dan mengelola kas tersebut.

Untuk mencari saldo kas di Bendahara Pengeluaran, selisih antara pengeluaran transito dan pendapatan transito ditambahkan ke saldo akhir kas dari tahun anggaran sebelumnya, yang diperoleh dari neraca lajur. Sisa setoran UP tahun 2022 akan diterima oleh UP TAYL sebagai pendapatan transito, dengan total Rp15.822.500,00. Per 31 Desember 2023, semua UP/TUP telah dicatat dan/atau disetorkan ke kas negara sehingga tidak ada saldo kas di Bendahara Pengeluaran.

b) Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga

Pada tahun 2023, Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga tumbuh sebesar Rp37.383.668.000,00 atau 100% dari tahun 2022 sebagai hasil dari saldo kas hibah pada satker KPU untuk Pemilihan Umum Presiden Indonesia.

c) Kas pada Badan Layanan Umum

Disebabkan adanya kas pada Badan Layanan Umum yang disahkan oleh KPPN melalui pengesahan SP2D atas Pendapatan dan Belanja Operasional BLU dan koreksi saldo awal kas BLU, jumlah kas BLU tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp130.585.424.560,00 atau 33,67%.

2) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp106.380.000,00. Berdasarkan pengembalian SP2D, utang kepada pihak ketiga pada tahun 2023 mengalami penurunan 100% dari tahun 2022.

3) Ekuitas

Pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2022, total ekuitas masing-masing sebesar Rp387.867.755.724,00 dan Rp555.714.645.784,00. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah ekuitas tahun 2023 sebesar Rp387.867.755.724,00 atau 43,27% dari tahun 2022.

Dalam neraca KPPN selaku Kuasa BUN hanya mencantumkan kas di Bendahara Pengeluaran, kas di BLU, dan kas lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari hibah. Hal ini dikarenakan KPPN Surakarta selaku Kuasa BUN merupakan entitas yang hanya mencerminkan transaksi kas dari satuan kerja didalam wilayahnya, sedangkan realisasi transaksi akan tercermin dalam neraca satuan kerja.

Hasil dari analisis *comparative* membuktikan bahwa neraca tahun 2023 secara keseluruhan mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2022. Terdapat peningkatan 100% di tahun 2023 pada Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga, sedangkan terjadi penurunan tahun 2023 sebesar 100% dari tahun 2022 pada utang pihak ketiga yang berasal dari retur SP2D.

Hasil kinerja yang berbeda ditunjukkan oleh analisis *comparative* terkait keuangan Nugroho, E. H. A., & Hermuningsih, S. (2023). Sementara beberapa penelitian mengungkapkan kinerja yang lebih rendah dan yang lain menunjukkan kinerja yang unggul.

Laporan arus kas menunjukkan penurunan arus kas dari aktivitas operasi dan investasi, yang dapat dikaitkan dengan peningkatan arus kas keluar yang melebihi arus kas masuk. Namun, kenaikan penerimaan non-anggaran PFK dan penerimaan transito, menunjukkan bahwa arus kas masuk melebihi arus kas keluar. Selanjutnya, kenaikan Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga pada neraca tahun 2023 dapat dikaitkan dengan volume transaksi hibah yang disetujui. Sementara itu, KPPN Surakarta selaku Kuasa BUN bertanggung jawab atas penurunan utang pihak ketiga dengan lebih disiplin dalam menyelesaikan transaksi retur SP2D.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dengan metode perbandingan dapat disimpulkan:

- a. Pada laporan arus kas tingkat KPPN Surakarta secara keseluruhan menunjukkan peningkatan. Peningkatan paling signifikan terdapat pada transaksi pendapatan hibah, Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2023 terdapat hibah uang yang diterima oleh satker KPU untuk keperluan Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024, serta penerimaan hibah uang pada satker Korem-074/WRT DAM IV/DIP, Polres Sukoharjo dan Lanud Adi Soemarmo. Sedangkan terdapat penurunan paling tinggi pada Pendapatan dari Alokasi APBN sebesar 70,81% dari tahun 2022.
- b. Transaksi penerimaan dan pengeluaran pada neraca tingkat KPPN yang berisi jumlah aset, jumlah kewajiban dan jumlah ekuitas secara keseluruhan menunjukkan peningkatan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Terjadi peningkatan sebesar 100% pada tahun 2023 yang berasal dari Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga dan Utang Kepada Pihak Ketiga, sedangkan penurunan 100% pada tahun 2023 berasal dari utang pihak ketiga. Hal ini menunjukkan efektivitas dan kualitas yang sangat baik dari transaksi penerimaan dan pengeluaran yang ditangani oleh KPPN Surakarta selaku Kuasa BUN.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Safari Sofyan. (1997). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Nurrahmania, N., & Huda, N. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan. *JURNAL MANAJEMEN*, 13(2), 245-251.
- Fahmi, I. (2012). *Analisis kinerja keuangan: panduan bagi akademisi, manajer, dan investor untuk menilai dan menganalisis bisnis dari perspektif keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- KPPN Surakarta. (2024). *Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-Daerah KPPN Surakarta Tahun 2023 (Audited)*. Surakarta: KPPN Surakarta.
- Kementerian Keuangan. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Kementerian Keuangan. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat.
- Kementerian Keuangan. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21.7/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Kementerian Keuangan. (2016). Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-56/PB/2016 tentang Pedoman Analisis Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa bendahara Umum Negara Tingkat Kantor Wilayah.
- Achmadi, A., dan Narbuko. (2015). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Nugroho, E. H. A., & Hermuningsih, S. (2023). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) VS Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) Periode Tahun 2020-2021. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 7(2).